JOURNAL SYNTAX IDEA
p–ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398
Vol. 7, No. 03, Maret 2025

POLITISASI BIROKRASI DALAM PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN TAKALAR

Rahmi[1], Muhammad[2], Ariana Yunus[3]
Universitas Hasanuddin, Indonesia
Email: rahmirajab52@gmail.com[1], alhamid.muhammad41@gmail.com[2], ariana.tugas@gmail.com[3]

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada politisasi birokrasi dalam pemerintahan di Kabupaten Takalar, sebuah isu yang sangat penting terkait dengan layanan publik dan efektivitas pemerintah. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami dinamika mutasi politik dalam birokrasi pemerintahan daerah serta dampaknya terhadap kualitas layanan yang diberikan. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, di mana data dikumpulkan melalui wawancara dan analisis dokumen. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa dua kali mutasi yang dilakukan oleh bupati Takalar terhadap kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil didasari oleh penilaian negatif dari ombudsman dan pelanggaran integritas. Namun, kedua mutasi tersebut tidak memperoleh persetujuan dari pihak terkait, yang mengarah pada teguran resmi dan pemutusan layanan publik yang seharusnya ada. Temuan ini menunjukkan adanya ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip good governance, seperti transparansi dan akuntabilitas. Implikasi dari penelitian ini menyoroti pentingnya reformasi dalam pengelolaan birokrasi agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan lebih efektif dan lebih mengutamakan kepentingan masyarakat, bukan sekadar kepentingan politik. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan berharga bagi pengambil kebijakan untuk meningkatkan kualitas layanan publik di daerah.

Kata kunci : mutase; good governance; kekuasaan.

ABSTRACT

This study examines the politicization of bureaucracy within the government of Takalar Regency, a critical issue that directly influences public services and government effectiveness. The primary aim is to explore the dynamics of political changes within the local government bureaucracy and their effects on service quality. Utilizing a qualitative research methodology with a case study approach, data was gathered through interviews and document analysis. The findings reveal that the two personnel changes initiated by the Takalar Regent concerning the Head of the Population and Civil Registration Service were influenced by negative assessments from the ombudsman and breaches of integrity. However, these changes lacked the necessary approval from relevant authorities, resulting in official reprimands and the suspension of essential public services. These results underscore a concerning disregard for the principles of good governance, particularly transparency and accountability. The implications of this study emphasize the urgent need for reform in bureaucratic management to enhance the effectiveness of government administration, ensuring that it prioritizes community interests over political agendas. It is hoped that these insights will provide valuable guidance for policymakers seeking to enhance the quality of public services in the region.

Keywords: *mutation; good governance; power.*

PENDAHULUAN

Birokrasi memiliki fungsi dan peran yang amat penting didalam masyarakat salah satunya adalah melaksanakan pelayanan publik (Dwiyanto, 2021). Namun seiring berjalannya waktu, muncul berbagai persoalan dalam birokrasi pemerintahan sehingga kemudian mengakibatkan terjadinya sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan dengan baik dan harus ditata ulang serta diperbaharui. Sehingga dalam reformasi birokrasi harus di tata kelola dan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengembang tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional (Purwanti et al., 2025).

Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat (Krisnandari et al., 2019). Untuk dapat mewujudkan tata pemerintahan yang baik, maka Pemerintah daerah atau kabupaten memiliki andil atau peran yang sangat penting dalam mengelola dan menata sistem birokrasi agar bisa berjalan dengan baik, dengan tujuan agar masyarakat dapat pelayanan yang terbaik. Karena pemerintah daerah atau kabupaten adalah suatu tingkat pemerintahan yang memiliki peranan penting dalam sistem pemerintahan (Ondang et al., 2019).

Wujud tata kelola pemerintahan dalam pelaksanaan good governance dalam birokrasi di daerah Kabupaten Takalar mencerminkan pelaksanaan good governance tidak berjalan dengan baik. Terkait dengan permasalahan mutasi yang dilakukan oleh bupati Takalar yang mendapat teguran keras dari kementrian dalam negri. Bupati Takalar melakukan mutasi kepada kepala dinas kependudukan dan catatn sipil sebanyak dua kali (Asrul & Burhanuddin, 2020), dan 2 kali pula mutasi tersebut mendapat teguran oleh kemendagri. Bupati Takalar melakukan mutasi kepada kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan alasan bahwa adanya penilain buruk oleh ombudsman terhadap kinerja kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang sangat mengecewakan, serta adanya beberapa pelanggaran fakta integritas yang dilakukannya sehingga bupati Takalar melakukan mutasi pertamanya kepada kepala dinas tersebut.

Penelitian ini memiliki signifikansi yang besar dalam menjelaskan urgensi yang melatarbelakangi pelaksanaan penelitian tersebut. Dalam konteks perkembangan pemerintahan di Kabupaten Takalar, politisasi birokrasi menjadi isu yang sangat penting untuk diteliti. Hal ini disebabkan oleh dampak signifikan yang ditimbulkannya terhadap pelayanan publik dan efektivitas pemerintahan. Seringkali, politisi dan pemimpin lokal memanfaatkan kekuasaan mereka untuk memengaruhi pengangkatan dan pemberhentian pejabat publik, yang pada gilirannya berdampak pada kualitas layanan yang diterima oleh masyarakat. Sebagai contoh, beberapa tahun terakhir, Kabupaten Takalar telah mengalami serangkaian mutasi pejabat publik yang kontroversial, terutama di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Peristiwa ini tidak hanya menarik perhatian pemerintah pusat, tetapi juga mendapat teguran tegas dari Kementerian Dalam Negeri karena

dianggap melanggar prosedur yang berlaku. Situasi ini mencerminkan adanya ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip good governance, seperti transparansi dan akuntabilitas, dalam pengelolaan pemerintahan.

Bupati Takalar melakukan mutasi terhadap kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar, mengalihkan tugasnya ke bagian pemerintahan ortala. Dalam kesempatan yang sama, bupati juga melantik pegawai baru untuk menduduki posisi tersebut. Namun, mutasi ini dianggap melanggar prosedur oleh Kementerian Dalam Negeri, karena tidak mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil. Sebagai akibatnya, Kemendagri mengeluarkan surat teguran bernomor 820/5894/DUKCAPL kepada bupati Takalar, meminta agar kepala dinas yang lama dikembalikan ke posisinya dalam waktu 14 hari. Sayangnya, bupati Takalar mengabaikan teguran tersebut, sehingga pada tanggal 27 Agustus 2019, kantor pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terpaksa ditutup. Penutupan ini terjadi karena jaringan SIAK (Sistem Administrasi Kependudukan) diputus oleh Direktorat Jenderal sebagai sanksi atas ketidakpatuhan terhadap perintah yang diberikan.

Konsep "governance" melibatkan tidak sekedar pemerintah dan negara, tetapi juga peran berbagai aktor diluar pemerintah dan negara (KCS Wibawa, 2019), sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas. Paulus Effendi Lotulung mengemukakan bahwa "Konsep governance dalam masyarakat sering dirancukan dengan konsep government (Firmansyah, 2022). Konsep governance lebih inklusif daripada government (Andriyan et al., 2024). Konsep government menunjuk pada suatu organisasi pengelolaan berdasarkan kewenangan tertinggi (Negara dan pemerintah) (Latief et al., 2023). Konsep governance melibatkan tidak sekedar pemerintah dan negara, sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas".

Terkait masalah tersebut, Bupati Takalar akhirnya memutuskan untuk mengembalikan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang lama ke posisinya, setelah sebelumnya ia digantikan oleh pegawai baru. Namun, tidak lama berselang, Kepala Dinas tersebut kembali dimutasi dengan alasan bahwa pengangkatan atau pelantikannya sebelumnya hanya dilakukan oleh bupati yang lama. Sebagai hasilnya, Bupati Takalar melakukan mutasi kedua sesuai dengan prosedur yang berlaku, dengan alasan yang serupa mengenai pelantikan oleh bupati sebelumnya.. Demikian, mutasi ini kembali mendapat teguran melalui surat No. 820/8444/DUKCAPIL dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil melalui Kementerian Dalam Negeri. Surat tersebut menegaskan bahwa pengangkatan dan pemberhentian Aparatur Sipil Negara (ASN) di bawah naungan Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil tidak dapat dilakukan oleh pemerintah daerah.

Pada akhirnya, Bupati memutuskan untuk mengembalikan Kepala Dinas yang sudah dua kali dimutasi tersebut ke posisinya sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar. Keputusan ini diambil dengan alasan bahwa jika posisinya tidak dikembalikan, bisa terjadi pemutusan jaringan dari pusat yang berpotensi merugikan masyarakat yang membutuhkan pelayanan dari kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.Kekuasaan erat kaitannya dengan pengaruh dan mempengaruhi.

Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan (*relationship*) dalam artian bahwa ada satu pihak yang memerintah dan ada pihak yang diperintah (*the ruler and ruled*) (Basniwati et al., 2023), satu pihak yang memberi perintah, satu pihak yang mematuhi perintah. Kekuasaan telah banyak dikemukakan oleh para ahli. Seperti yang dikutip oleh Mirriam Budiardjo Kekuasaan adalah kemampuan untuk, dalam suatu hubungan sosial, melaksanakan kemauan sendiri sekalipun mengalamai perlawanan (SINAGA, 2023). Hal demikian yang terjadi diKabupaten Takalar dimana bupati Takalar sebagai seorang yang memiliki kekuasaan telah melakakan mutasi sebanyak duakali walaupun mutasi tersebut duakali pula tidak mendapat persetujuan bahkan berujung dengan teguran keras dari Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil melalaui mendagri.

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini berfungsi sebagai landasan dalam membandingkan penelitian terdahulu yang membahas mutasi politik dalam birokrasi, seperti penelitian (Wahyu et al., 2012), dengan penelitian yang dilakukan penulis di Kabupaten Takalar. Perbedaan utama terletak pada lokasi, objek, serta teori yang digunakan. Untuk mendukung analisis, penelitian ini menggunakan teori kekuasaan dan good governance. Max Weber, Ramlan Surbakti, dan Robert Dahl mendefinisikan kekuasaan sebagai kemampuan mempengaruhi pihak lain dalam proses pengambilan keputusan, sementara good governance, menurut Kasman Abdullah, menekankan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemerintahan (Tawaang et al., 2023). Peneliti menyoroti bahwa dalam praktiknya, mutasi dalam birokrasi daerah sering kali dipengaruhi oleh kekuasaan pemimpin tanpa sepenuhnya mengikuti prinsip good governance. Konsep otonomi daerah yang seharusnya menjamin tata kelola pemerintahan yang baik justru dapat dimanfaatkan oleh pemegang kekuasaan untuk melakukan mutasi berdasarkan kepentingan tertentu, bukan semata-mata demi efisiensi birokrasi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dinamika mutasi politik yang terjadi dalam birokrasi pemerintah daerah di Kabupaten Takalar. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi dampak politisasi birokrasi terhadap kualitas pelayanan publik dan tata kelola di daerah tersebut. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai penggunaan kekuasaan serta dampaknya terhadap praktik birokrasi lokal. Dengan demikian, langkah-langkah perbaikan dalam pemerintahan daerah dapat diusulkan secara lebih efektif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di instansi birokrasi pemerintah Kabupaten Takalar. Metode yang digunakan dalam studi ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pemilihan tipe penelitian ini didasari oleh kenyataan bahwa meskipun kasus serupa dapat ditemukan di tempat lain, fokus penelitian penulis terbatas pada kasus yang terjadi di Kabupaten Takalar. Untuk mengumpulkan data, penulis melakukan Field Research (penelitian lapangan) dengan menerapkan metode yang telah ditentukan. Proses penelitian lapangan terdiri dari beberapa bagian, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, di mana data yang diperoleh dari wawancara,

dokumentasi, dan studi pustaka diinterpretasikan melalui beberapa tahapan. Pertama, data dikelompokkan dan diolah untuk mendapatkan keseluruhan hasil penelitian. Selanjutnya, data disajikan dengan cara mengelompokkan dan menguraikan informasi yang telah diperoleh. Terakhir, penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Era pemerintahan di Kabupaten Takalar, di bawah kepemimpinan Bupati yang terpilih pada tahun 2017, telah mengalami banyak perubahan yang signifikan. Pembangunan mulai dilakukan secara intensif, dan terdapat perombakan anggota dalam birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Pada awal menjabat, Bupati Takalar telah mengambil sejumlah langkah penting, termasuk pemecatan honorarium di setiap lembaga pemerintahan, khususnya di Dinas Kesehatan, serta melakukan mutasi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Perubahan semacam ini menjadi hal yang lumrah, terutama setelah pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang baru. Masyarakat sering memperbincangkan mutasi dalam birokrasi ini. Para pejabat yang ingin meraih jabatan strategis cenderung mendekatkan diri kepada pemimpin terpilih, sementara mereka yang tidak sejalan dengan visi pemimpin tersebut akan kesulitan untuk mendapatkan posisi yang diidamkan. Fenomena ini dapat menciptakan dinamika politisasi dalam birokrasi secara tidak langsung.

Pengaruh dan kekuasaan adalah dua faktor krusial yang menentukan posisi seorang pemimpin. Dalam konteks pemerintahan, seringkali seorang pemimpin hanya mengandalkan kekuasaan yang diberikan oleh pihak yang mengangkatnya, tanpa menyadari pentingnya pengaruh yang seharusnya menjadi prioritas. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa birokrasi pemerintah cenderung mengabaikan asal-usul dan kualitas pribadi seseorang ketika mereka menjabat sebagai atasan; dengan otomatis, kekuasaan akan menyertainya. Akibatnya, hubungan antara pemimpin dan bawahannya, serta dengan publik, sering kali bersifat kekuasaan semata. Mari kita perhatikan praktik kepemimpinan formal, seperti kepala daerah atau menteri. Begitu mereka menjabat, kekuasaan seolah melekat pada posisi mereka, mempengaruhi perilaku mereka. Kita sering mendengar atau menyaksikan bupati yang dengan mudahnya memecat, mengganti, menurunkan, atau mempromosikan bawahan mereka tanpa mematuhi aturan formal yang seharusnya diterapkan. Keadaan ini menyoroti pentingnya pengaruh yang lebih dari sekadar kekuasaan dalam kepemimpinan yang efektif.

Penggantian dan pengangkatan dalam struktur pemerintahan sering kali terjadi akibat keputusan kepala daerah atau menteri, didorong oleh kekuasaan yang mereka miliki. Sayangnya, keputusan ini kadang diambil tanpa mempertimbangkan perbedaan antara mereka dan subordinasi mereka. Kekuasaan jabatan dapat memberikan dampak positif maupun negatif bagi bawahannya. Contohnya, berapa banyak kepala dinas atau sekda yang diangkat atau diganti oleh Bupati hanya karena mereka dianggap tidak mendukung kampanye pencalonan Bupati tersebut? Selain itu, banyak juga staf yang dipromosikan meski tidak memiliki rekam jejak kompetensi yang memadai, hanya karena mereka memberikan dukungan kepada pencalonan tersebut.

Dinamika Mutasi Politik Pertama

Salah satu birokrasi pelayanan yang akan menjadi pusat pembahasan dalam tulisan ini adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (S Suleman, 2019). Kita semua memahami bahwa salah satu tugas utama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah

memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk dalam proses pembuatan E-KTP, akta, dan Kartu Keluarga. Bayangkan jika layanan ini terganggu atau bahkan tidak dapat diakses oleh masyarakat. Hal ini pernah terjadi di Kabupaten Takalar, ketika Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di sana dinonaktifkan dan tidak melayani masyarakat selama dua pekan. Penutupan layanan ini disebabkan oleh pemutusan jaringan dari pusat, yang disebabkan oleh Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Pusat. Kejadian ini berawal saat Bupati Takalar melakukan mutasi terhadap kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar. Mutasi tersebut diambil karena adanya laporan dari Ombudsman mengenai penilaian rendah terhadap kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Takalar. Beberapa faktor lain juga mendukung keputusan ini, termasuk pelanggaran terhadap fakta integritas yang dilakukan oleh kepala dinas. Akibatnya, kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tersebut dipindahkan ke bagian organisasi dan tata laksana (ortala).

Perubahan susunan atau anggota dalam birokrasi yang dilakukan oleh kepala daerah bertujuan untuk mewujudkan good governance dalam sistem pemerintahannya. Namun, tindakan ini tidak mengikuti prosedur yang berlaku, sehingga mutasi tersebut menimbulkan masalah bagi Kementerian Dalam Negeri. Akibatnya, muncul surat teguran kepada Bupati Takalar karena melakukan mutasi yang tidak sesuai prosedur, dengan instruksi untuk mengembalikan kepala dinas yang dimutasi ke posisinya semula. Bupati Takalar, dalam melakukan mutasi terhadap kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, juga melantik pegawai baru untuk mengisi jabatan tersebut pada saat yang bersamaan.

Setelah Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil menyadari bahwa surat teguran yang diberikan melalui Menteri Dalam Negeri kepada Bupati Takalar diabaikan, akhirnya pemutusan jaringan SIAK (Sistem Administrasi Kependudukan) terjadi di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar. Langkah ini diambil sebagai efek jera akibat pengabaian surat teguran tersebut. Beberapa pekan setelah jaringan dinonaktifkan, pelayanan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar terpaksa dihentikan, yang tentunya merugikan masyarakat. Dalam upaya mengatasi masalah ini, Bupati Takalar memutuskan untuk mengembalikan Kepala Dinas yang sebelumnya dijabat, yang sempat digantikan. Dengan diembalikannya posisi Kepala Dinas, diharapkan Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil akan mengaktifkan kembali jaringan SIAK, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat kembali berjalan normal.

Dinamika Mutasi Politik Kedua

Masalah mutasi ini tidak berhenti di situ. Proses mutasi terus berlanjut di lingkungan birokrasi Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan. Hanya berselang sebulan dan sepuluh hari setelah menjabat kembali sebagai Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan, Bupati Takalar melakukan mutasi kembali pada tanggal 18 Oktober 2019, namun kali ini ke Dinas Kesehatan. Kejadian ini terasa sangat janggal, mengingat beliau baru saja diangkat kembali ke posisinya dan kini harus menjalani mutasi lagi. Alasan di balik mutasi ini adalah bahwa pengangkatan kepala dinas sebelumnya dilakukan oleh bupati yang sudah tidak menjabat lagi. Oleh karena itu, Bupati Takalar memutuskan untuk melaksanakan mutasi sesuai dengan prosedur yang berlaku, dengan mengusulkan beberapa nama sebagai pengganti kepala dinas kepada Menteri Dalam Negeri. Proposal tersebut kemudian akan diteruskan ke pusat untuk mendapatkan keputusan apakah disetujui atau tidak.

Setelah beberapa waktu berlalu tanpa mendapat balasan dari Kementerian Dalam Negeri atau Direktorat Jenderal terkait usulan tersebut, Bupati Takalar akhirnya

memutuskan untuk melakukan mutasi kedua kali. Kali ini, mutasi tersebut kembali dijatuhkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, yang sebelumnya sudah pernah dimutasi. Tindakan ini diambil oleh Bupati Takalar, mengingat kewenangannya sebagai kepala daerah serta tidak adanya respon dari pusat terhadap usulannya, sehingga beliau merasa perlu untuk mengambil langkah lebih lanjut. Dalam mutasi terbaru ini, Kepala Dinas tersebut dipindahkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar, dan posisinya sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kembali diisi oleh orang yang sama yang sebelumnya pernah menjabat.

Fenomena politik birokrasi yang dijelaskan di atas menjadi tantangan signifikan bagi demokrasi di daerah, terutama di tengah upaya untuk menegakkan netralitas demi mewujudkan demokrasi yang adil. Dalam konteks ini, harapan untuk mencapai demokrasi yang sejati dan tata kelola pemerintahan yang baik semakin terasa sulit. Padahal, kita semua mengetahui bahwa profesionalisme aparat dalam memberikan pelayanan adalah salah satu indikator penting dalam mewujudkan good governance. Tata kelola pemerintahan yang baik dapat terwujud dan berhasil jika didukung oleh aparatur yang memiliki profesionalisme tinggi, terutama dalam memenuhi akuntabilitas dan tanggung jawab publik (Buja Wutun et al. , 2024). Oleh karena itu, penting untuk meminimalkan praktik politisasi dan lebih mengutamakan sistem yang profesional dan akuntabel.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa politisasi birokrasi di Kabupaten Takalar memberikan dampak yang signifikan terhadap kualitas layanan publik dan penerapan prinsip-prinsip good governance. Serangkaian mutasi yang dilakukan oleh Bupati Takalar terhadap Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menunjukkan bahwa keputusan tersebut lebih dipengaruhi oleh kepentingan politik dan kekuasaan, ketimbang berdasar pada prosedur yang transparan. Dua kali mutasi yang disertai dengan teguran dari kementerian mencerminkan adanya ketidakpatuhan terhadap norma serta tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, untuk mewujudkan good governance, sangat penting bagi pemerintah daerah untuk menekankan profesionalisme, akuntabilitas, dan transparansi dalam setiap kebijakan yang diambil, serta mengurangi praktik politisasi yang dapat merugikan masyarakat.

DAFTAR PUSTKA

Andriyan, Y. (2024). Transformasi E-Government Menuju Good Governance Di Pemerintah Kabupaten Sorong. *Ejournal.Edukhatulistiwa.Com*. Https://Ejournal.Edukhatulistiwa.Com/Index.Php/Samakta/Article/View/127

Asrul, M., & Burhanuddin, B. (2020). Pelaksanaan Mutasi Pejabat Struktural Di Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar. *Academia.Edu*. Https://Www.Academia.Edu/Download/86875472/4060-12239-1-Pb.Pdf

Basniwati, A., Umam, K., (2023). Kewenangan Bale Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Pidana Dan Perdata Berdasarkan Peraturan Derah Ntb Nomor 9 Tahun 2018. *Proceeding.Unram.Ac.Id*, *5*, 2023. Https://Proceeding.Unram.Ac.Id/Index.Php/Pepadu/Article/View/844

Buja Wutun, D., Susu, M. T., Tokan, F. B., Katolik, U., & Kupang, W. M. (2024). Tata Kelola Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa Belobatang Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata Tahun 2021. *Ojs.Cahayamandalika.Com*, *5*(2). Https://Www.Ojs.Cahayamandalika.Com/Index.Php/Jcm/Article/View/2426

Dwiyanto, A. (2021). *Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia*. Https://Books.Google.Com/Books?Hl=Id&Lr=&Id=Vtmxeaaaqbaj&Oi=Fnd&Pg=Pa1&Dq=Birokrasi+Memiliki+Fungsi+Dan+Peran+Yang+Amat+Penting+Didalam+Masyarakat+Salah+Satunya+Adalah+Melaksanakan+Pelayanan+Publik&Ots=Vq5eovhxp2&Sig=6klmoufiiolw_Fbrjqkop_Wyff8

Firmansyah, A. (2022). Eksistensi Ombudsman Republik Indonesia (Ori) Sebagai State Auxiliary Organs Dalam Mewujudkan Good Governance Di Indonesia. *Repository.Uinjkt.Ac.Id*. Https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Handle/123456789/43162

Kcs Wibawa. (2019). Pengawasan Partisipatif Untuk Mewujudkan Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Di Indonesia. *Ejournal2.Undip.Ac.Id*, *2*(4). Https://Ejournal2.Undip.Ac.Id/Index.Php/Alj/Article/View/6528

Krisnandari, D. (2019). Penerapan Teknologi Informasi Dalam Reformasi Birokrasi Pada Bidang Pendidikan. *Researchgate.Net*. Https://Www.Researchgate.Net/Profile/Nyoman-Putra-Sastra-2/Publication/336984600_Penerapan_Teknologi_Informasi_Dalam_Reformasi_Birokrasi_Pada_Bidang_Pendidikan/Links/5dc975fa4585151435035938/Penerapan-Teknologi-Informasi-Dalam-Reformasi-Birokrasi-Pada-Bidang-Pendidikan.Pdf

Latief, F., (2023). Analisis Peran Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Wilayah Perbatasan. *E-Journallppmunsa.Ac.Id*. Http://Www.E-Journallppmunsa.Ac.Id/Index.Php/Jeb/Article/View/1323

Ondang, C., Singkoh, F., (2019). Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Di Kabupaten Minahasa (Suatu Studi Di Dinas Koperasi Dan Ukm). *Ejournal.Unsrat.Ac.Id*. Https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/Index.Php/Jurnaleksekutif/Article/View/25488

Purwanti, U., Andriyani, D., Nirmala, I., Juliartha, E., & Gustiawan, R. (2025). Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Kinerja Pelayanan Kelurahan Karang Anyar Kota Palembang. *Ejournal.Pps-Unisti.Ac.Id*. Http://Www.Ejournal.Pps-Unisti.Ac.Id/Index.Php/Jiask/Article/View/288

S Suleman. (2019). Kualitas Pelayanan E-Ktp Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan. *Core.Ac.Uk*, *5*(1). Https://Core.Ac.Uk/Download/Pdf/233603005.Pdf

Sinaga, C. (2023). *Tinjauan Hukum Terhadap Kedudukan Dan Kewenangan Mpr Sebelum Dan Sesudah Amandemen Uud 1945*. Http://Portaluniversitasquality.Ac.Id:55555/2121/

Tawaang, F., Cahyo Nugroho, A., & Mudjiyanto, B. (2023). Membaca Ulang Konsep Modernisasi Politik, Pembangunan Politik, Dan Demokrasi. *Ejurnal.Ubk.Ac.Id*. Https://Www.Ejurnal.Ubk.Ac.Id/Index.Php/Communitarian/Article/View/322

Wahyu, M., Kadir, A., (2012). Analisis Pelaksanaan Mutasi Jabatan Di Pemerintah Kabupaten Luwu Utara. *Journal-Old.Unhas.Ac.Idm Wahyu, Ag Kadir, Al Irwangovernment: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2012•Journal-Old.Unhas.Ac.Id*, *5*(2), 55–64. Http://Journal-Old.Unhas.Ac.Id/Index.Php/Government/Article/View/1359

Copyright holder:
Rahmi[1], Muhammad[2], Ariana Yunus[3] (2025)

First publication right:
Syntax Idea

This article is licensed under: